

**PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI DAN KOMITMEN ORGANISASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI KOTA BANDUNG**

**EFFECT OF COMPETENCE OF EMPLOYEES AND ORGANIZATIONAL
COMMITMENT TOWARD QUALITY OF FINANCIAL REPORTS IN LOCAL
DEPARTMENT OFFICE IN BANDUNG**

Nugraha, Arvian Triantoro dan Ika Famela Kurnia
Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia
Gedung Garnadi
Jl. Dr. Setiabudhi 229. Bandung 40154 Jawa Barat
Telp/Fax: (022) 2001619/ (022) 2001621
Email: arvian_triantoro@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of employee competence to quality financial statements, the effect of organizational commitment to quality financial reporting and jointly determine the effect of employee competency and organizational commitment to quality financial reporting unit (SKPD) in Bandung. The method used is the multiple correlations, analysis of a total of 39 units of work units on education entities. Respondents of this study are part of the staff at each entity and the financial inspectorate Bandung. Based on the analysis that had been done, that there is a positive effect between employee competencies against the quality of financial reporting by 41.8%. There is effect between organizational commitments to quality financial reporting by 37.6% and together the competence of employees and organizational commitment affect the quality of financial reporting unit (SKPD) in Bandung by 25.9% and its residual influenced by other factors.

Keywords: employee competence, organizational commitment, the quality of financial reporting of Municipal Unit (SKPD)

A. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Agar informasi keuangan tersebut dapat

bermanfaat bagi para pengguna nya maka sebuah informasi harus dapat memenuhi kualitas tertentu. Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yaitu Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Namun setelah diberlakukannya paket undang-undang tersebut, hampir belum ada kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara maupun Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam 3 tahun terakhir ini secara umum

menunjukkan kualitas yang masih jauh dari harapan. Berdasarkan data dari IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) yang dikeluarkan BPK untuk semester satu tahun 2012 menunjukkan sebagai berikut:

- 1) Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2011 adalah sebanyak 16%, meningkat 10% dari Tahun 2010 sebanyak 6%.
- 2) Persentase LKPD yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2011 adalah sebanyak 74% meningkat 8% dari Tahun 2010 sebanyak 66%.
- 3) Persentase LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) pada Tahun 2011 adalah sebanyak 1%, turun 4% dari Tahun 2010 sebanyak 5%.
- 4) Persentase LKPD yang memperoleh opini Tidak Memberi Pendapat (TMP)/ *disclaimer* pada Tahun 2011 adalah sebanyak 9% turun 14% dari Tahun 2010 sebanyak 23%.
- 5) Selain itu hasil temuan / evaluasi kelompok SPI atas Pemeriksaan Keuangan, menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI diantaranya ada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.791 kasus, terdiri dari: 1.005 kasus pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat, sebanyak 603 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, sebanyak 13 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan, dan sebanyak 147 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan sebanyak 23 kasus sistem

informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Sedangkan pada Pemerintah Kota Bandung dijelaskan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 terdapat temuan kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang salah satunya pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Temuan kasus-kasus pada Pemerintah Kota Bandung dijelaskan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 dimana terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan di Kota Bandung

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>		
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	8
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	-
3	Kekurangan Penerimaan	1
Sub Total 1		9
4	Administrasi	6
5	Ketidakhematan	-
6	Ketidakefisienan	-
7	Ketidakefektifan	3
Sub Total 2		9
Total		18

Sumber : IHPS I Kota Bandung Tahun 2012

Berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada serta opini yang diraih oleh kota Bandung tiga tahun terakhir ini terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung secara umum menunjukkan kualitas yang masih jauh dari harapan. Dilihat sampai dengan tahun 2011 Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini artinya secara

keseluruhan laporan keuangan telah disajikan dengan benar kecuali untuk aspek tertentu dari laporan keuangan. Dan temuan ini berulang tiap tahun terjadi, ini mencerminkan kelambanan pemerintah dalam memperbaiki administrasi keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu tepat waktu. Selain itu juga dijelaskan masih ada kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan terkait dengan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas Laporan Keuangan dikarenakan pemerintah daerah masih belum melakukan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangannya dengan baik, maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan yang berkompeten di bidang keuangan.

Rensis Likert dalam Arfan Ikhsan (2010:499) *menegaskan bahwa setiap aspek dari aktivitas suatu perusahaan/organisasi ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan, motivasi dan efektivitas umum dari organisasi manusianya.* Hal ini diperjelas oleh Elvyra Zeyn (2011), dengan terciptanya pemerintahan yang bersih (*good governance*) akan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh kompetensi pegawai disertai dengan komitmen organisasi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan Studi Davis dalam Arfan Ikhsan (2010:144), mengatakan dalam bidang sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi *'.....khususnya pengalaman dan pengetahuan menunjukkan peluang riset saat ini.'*

Beberapa riset seputar kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih menarik dan banyak diteliti diantaranya Asep Sudrajat Hardipradja (2009), Devi Roviyantie (2008), M.Nuryanto dan Nunuy dalam tulisannya meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel kompetensi, Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ada pengaruh positif kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu juga, Penelitian lainnya yang meneliti kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel yang berbeda juga dilakukan oleh Elvyra Zeyn (2011), Ifa Ratifah dan M.Ridwan (2012) dalam tulisannya meneliti kualitas laporan keuangan dengan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa riset sebelumnya (Elvyra Zeyn (2011);Ifa Ratifah dan M.Ridwan (2012) menggunakan variabel komitmen organisasi hanya sebagai variabel pemoderasi. Maka dari itu, yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah dengan mengembangkan penelitian tersebut dengan mengambil variabel kompetensi pegawai dan variabel komitmen organisasi sebagai variabel bebas atau Independent Variabel (X) untuk diteliti pengaruhnya pada kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung.

B. KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kerangka Konsep

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan pemerintah daerah, mengacu kepada standar kompetensi lulusan akuntansi yang ditetapkan oleh IFAC (*International Federation of Accountants*), yakni IES (*International Education Standards*), dalam hal ini IES 2, IES 3, IES 4 yang mencakup dimensi *knowledge, skills, and attitude*. Berikut pemaparannya :

Tabel 2
Pemaparan Dimensi *knowledge, Skills and Attitude*

Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya - pengetahuan mengenai kegiatan bisnis/ sektor publik dan pengorganisasian - pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi
Keterampilan/ kemampuan (<i>skills</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - keterampilan teknis dan fungsional - keterampilan intelektual - keterampilan berorganisasi - Keterampilan Personal - keterampilan komunikasi dan intrapersonal
Sikap Perilaku (<i>attitude</i>)	<p>memiliki komitmen untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab sosial - pengembangan diri dan belajar secara terus menerus - dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai - hukum dan peraturan yang berlaku

Sumber : IFAC (*International Federation of Accountants*)

Sedangkan komponen utama mengenai komitmen organisasi merujuk kepada Allen dan Meyer dalam Natalia (2010) :

a. Komitmen afektif (*affective commitment*)

Terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional (*emotional attachment*) atau psikologis terhadap organisasi.

b. Komitmen kontinu (*continuance commitment*)

Muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan – keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut tinggal di organisasi tersebut karena dia membutuhkan organisasi tersebut.

c. Komitmen normative (*normative commitment*)

Timbul dari nilai- nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi tersebut merupakan hal yang memang harus dilakukan. Jadi, karyawan tersebut tinggal di organisasi itu karena ia merasa berkewajiban untuk itu.

Sementara konsep laporan keuangan, menurut Indra Bastian (2006:96), "*laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.*" Sementara menurut Kieso et al (2004:2) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah:

" financial statement are the principal means through which financial information is communicated to those outside an enterprise, their statements provide firm history quantified in money terms."

Menurut PP No 71 Tahun 2010, 'Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan'. Maka dari itu dapat disimpulkan, bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan mengenai posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang merupakan alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Pengembangan Hipotesis

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan daerah (PP No 58 Tahun 2005).

Laporan Keuangan merupakan salah satu media pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan, laporan tersebut memuat berbagai informasi terkait dengan kondisi keuangan pada sebuah entitas. Menurut Indra Bastian (2006:247): 'Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik'.

Menurut Mardiasmo (2002:159) mengatakan bahwa "'akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang

bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi". Jadi dapat disimpulkan bahwa, laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang berisi informasi yang terkait dengan kondisi keuangan pada suatu entitas yang digunakan untuk menilai kinerja entitas tersebut.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan berkualitas dapat memenuhi karakteristik yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Agar laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas dan memenuhi standar menurut PP No 71 Tahun 2010, diperlukan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* yaitu, kompetensi pegawai yang kompeten dibidangnya yang didukung oleh komitmen yang tinggi sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas. Selain itu juga, dengan memiliki pegawai yang berkompentensi dan didukung oleh komitmen dan kompetensi yang kuat, maka organisasi akan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sekaligus menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Riset seputar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak diteliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Asep Sudrajat Hardipradja (2009), Devi Roviyantie (2008), M.Nuryanto dan Nunuy dalam tulisannya meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel kompetensi, baik itu kompetensi PPK SKPD, kompetensi SDM maupun kompetensi karyawan (Pegawai). Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Seperti dikatakan pula dalam sebuah artikel dari Kaditama Revbang BPK-RI tentang Kesiapan SDM Pemerintah menuju tata

kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan oleh Daeng M.Nazier menyatakan bahwa permasalahan atas kualitas laporan keuangan pemerintah dibutuhkan SDM pemerintah yang berkompoten dibidang nya serta perlu adanya tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan dan dibutuhkan komitmen dari seluruh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan Negara.

Begitu juga penelitian dari Elvyra Zeyn (2011), Ifa Ratifah dan M.Ridwan (2012) dalam tulisannya meneliti kualitas laporan keuangan dengan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

“Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Bandung”.

C. METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal. Menurut Husein Umar (2008:8) bahwa, “desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lain”. Sementara objek penelitian merupakan variabel yang menjadi perhatian peneliti. Objek penelitian tersebut adalah Pegawai di bidang Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Lokasi penelitian bertempat di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung. Responden penelitian adalah Pegawai Bagian keuangan yang

bekerja di setiap SKPD Pemerintah Kota Bandung. Sampel yang diambil sebanyak 39 SKPD dari 63 SKPD.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kompetensi Pegawai (standar kompetensi lulusan akuntansi yang ditetapkan oleh IFAC (International Federation of Accountants),)	Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya	Interval
		pengetahuan mengenai kegiatan bisnis/ sektor publik dan pengorganisasian	
		pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi	
Keterampilan/ kemampuan (<i>skills</i>)		keterampilan teknis dan fungsional	Interval
		keterampilan intelektual	
		Keterampilan berorganisasi	
		Keterampilan Personal	
Sikap Perilaku (<i>attitude</i>)		keterampilan komunikasi dan intrapersonal	Interval
		memiliki komitmen untuk : kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab sosial	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		Pengembangan diri dan belajar secara terus menerus dapat diandalkan, bertanggung-jawab, tepat waktu dan saling menghargai	
Komitmen Organisasi (Alen and Meyer dalam Stefen Jaros)		hukum dan peraturan yang berlaku	
	<i>Affective Commitment</i>	tingkat rasa memiliki (<i>sense of belonging</i>) tingkat <i>emotional attached</i> tingkat <i>personal meaning</i>	Interval
	<i>Continuance (memelihara keanggotaan)</i>	tingkat pertimbangan pemilihan pekerjaan lain tingkat motivasi mengejar <i>benefit</i> tingkat pertimbangan biaya pindah pekerjaan	Interval
	<i>Normative Commitment</i>	tingkat keyakinan untuk loyal tingkat keyakinan akan etika	Interval
Kualitas Laporan Keuangan (PP No 71 Tahun 2010)	Relevan	memiliki manfaat umpan balik memiliki nilai prediksi tepat waktu	Interval

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		lengkap	
	Handal	penyajian jujur dapat diverifikasi netralitas	Interval
	Dapat dibandingkan	Dapat dibandingkan	Interval
	Dapat dipahami	Dapat dipahami	Interval

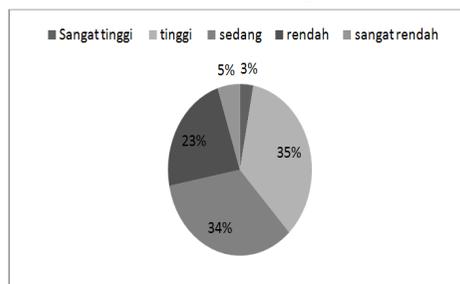
Sumber : data primer (diolah)

D. HASIL PENELITIAN DAN UJI HIPOTESIS

1. Gambaran Kompetensi Pegawai

Kompetensi pegawai di kota Bandung termasuk tinggi, dengan banyaknya pegawai dengan kemampuan tinggi sebanyak 23 orang, pegawai dengan kemampuan sedang sebanyak 22 orang dan pegawai dengan kemampuan rendah sebanyak 15 orang. Sisanya pegawai dengan kemampuan sangat tinggi sebanyak 2 orang dan pegawai dengan kemampuan sangat rendah sebanyak 3 orang.

Gambar 1
Gambaran Kompetensi Pegawai

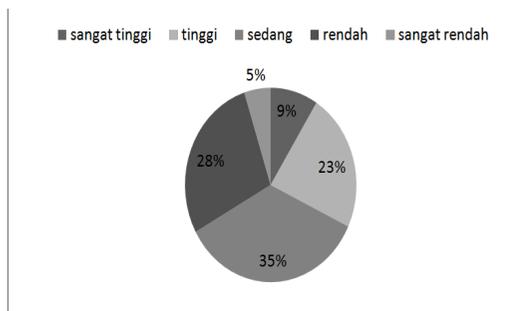


Sumber: data primer diolah

2. Gambaran Komitmen Organisasi

Sebagian besar pegawai di Kota Bandung memiliki komitmen organisasi pada level sedang, yaitu sebanyak 23 orang. Artinya bahwa ada kemungkinan sebagian besar pegawai itu untuk pindah ataupun menetap pada perusahaan tempatnya bekerja. Pegawai dengan komitmen sangat tinggi berjumlah 6 orang dan pegawai dengan komitmen tinggi berjumlah 15 orang. Pegawai ini kemungkinan besar untuk menetap di perusahaan tempatnya bekerja apapun yang terjadi terhadap perusahaannya. Pegawai dengan komitmen rendah berjumlah 18 orang dan pegawai dengan komitmen sangat rendah berjumlah 3 orang.

Gambar 2
Gambaran Komitmen Organisasi



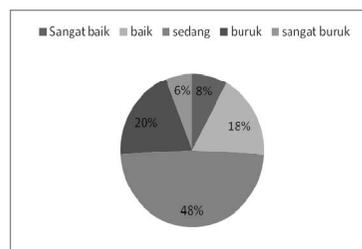
Sumber : data primer (diolah)

3. Gambaran Kualitas Laporan Keuangan

Sebagian besar perangkat daerah di kota Bandung memiliki kualitas laporan keuangan pada level sedang. Bisa dilihat dari frekuensi kategori sedang sebanyak 31. Hanya 5 perangkat daerah yang memiliki kualitas laporan keuangan sangat baik dan 12 perangkat daerah yang memiliki kualitas laporan keuangan dengan kategori baik. Terdapat 17 perangkat daerah dengan predikat jelek dalam hal kualitas laporan keuangan. Bisa dilihat dalam tabel frekuensi kategori buruk sebanyak 13 dan kategori sangat jelek sebanyak 4.

Dianjurkan diadakannya pelatihan kepada para pegawai di perangkat daerah tersebut. Jika dibuat grafik, maka diperoleh gambaran sebagai berikut

Gambar 3
Gambaran Persentase Kualitas Laporan



Sumber : data primer (diolah)

4. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui keberpengaruhannya kedua variabel bebas secara bersama-sama tersebut terhadap variabel terikatnya, yaitu pengaruh antara kompetensi pegawai dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bandung. Dilakukan uji Korelasi ganda menggunakan *software* SPSS 20.0 for windows, dengan hasil sbb:

Tabel 3
Pengaruh Antara Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 ^a	.259	.236	3.81512

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: data primer (diolah)

Berdasarkan data di atas, ditunjukkan bahwa nilai dari *R Square* sebesar 0.259, karena nilai $R > 0$ maka hipotesis tiga diterima, atau dengan kata lain kompetensi pegawai dan komitmen organisasi secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Untuk mengetahui tinggi rendahnya pengaruh suatu variabel

lainnya dihitung menggunakan koefisien determinasinya (KD) adalah

$$R \text{ Square} \times 100\% = 0.259 \times 100\% = 25.9\%$$

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa kompetensi pegawai dan komitmen organisasi secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 25.9% dan sisanya sebesar 74.1% dipengaruhi oleh faktor lain. Angka ini menunjukkan kecilnya kontribusi dua variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikatnya.

E. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi pegawai dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan kompetensi pegawai dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ini artinya semakin kompeten pegawai tersebut khususnya dalam bidang keuangan atau yang menyusun laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporannya yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yakni penelitian dari Asep Sudrajat Hardipradja (2009), Devi Roviyantie (2008), M.Nuryanto dan Nunuy dalam tulisannya meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel kompetensi, Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ada pengaruh positif kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya untuk variabel komitmen organisasi, ternyata komitmen organisasi juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung. Ini artinya ketika seorang pegawai mempunyai komitmen yang

tinggi terhadap apa yang menjadi pencapaian tujuan organisasinya maka akan semakin baik pula *output* nya. Begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yaitu oleh Elvyra Zeyn (2011), Ifa Ratifah dan M.Ridwan (2012) dalam tulisannya meneliti kualitas laporan keuangan dengan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun hubungan komitmen organisasi dan kompetensi pegawai adalah apabila kemampuan suatu organisasi dalam mengelola karyawannya dengan baik, maka akan menimbulkan komitmen yang kuat dari karyawannya terhadap organisasi. Kondisi seperti ini sangat baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Komitmen yang tinggi harus didukung juga oleh kompetensi yang dimiliki pegawai. Hal ini mempertegas penelitian Elvira Zeyn (2008) yang menyatakan bahwa semakin baik komitmen organisasinya akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik. Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah (Zeyn: 2008).

F. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bandung dipengaruhi oleh kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi.

Selanjutnya disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk , meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, seperti Variabel

Pengawasan Intern, Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP), serta masih banyak lainnya yang dapat dijadikan variabel penelitian, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Sedangkan untuk Pemerintah Kota Bandung disarankan agar mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai bagaimana penyusunan

laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku serta memberikan semacam *reward* apabila pegawai memberikan hasil kerja yang memuaskan agar pegawai senantiasa memiliki rasa komitmen dan loyal terhadap organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati Dini, *Pengaruh Pemahaman Manajer Publik atas Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Publik di Pemerintah Kota Bandung*, Jurnal Ekonomi Insentif Kopwil4, Volume 5 No.1, Juli 2011
- Bastian, I (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga
- Bima Rinaldy, *Fungsi Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Makassar*, Jurnal Ilmiah Ishlah, ISSN-9328, Vol.13 No.03/Sept-Desember 2011
- Dewinda, N. (2010). *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten tegal*, Universitas Diponegoro Semarang
- Hafiz T, Abdul 2006. *akuntansi pemerintah daerah*. afabeta.bandung
- Ikhsan, A (2010). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba empat
- Jaros, Stephen, 2007. *Meyer and Allen Model Of Organizational Commitment : Measurement Issues*. ICAFI 8 Jurnal Perilaku Organisasi, Vol. VI, No 4, 2007
- M Nazier Daeng , *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara Yang Akuntabel dan Transparansi*
- Mardiasmo, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moehariono, 2009, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Ghalia Indonesia
- Nungraheni Purwanti, dkk, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal ekonomi Bisnis No 1 Vol.13 April 2008. Pasca Sarjana Universitas Gunadarma
- Nuryanto, dan Nunuy. *The impact of internal control, information technology utilization and the competence of employees on financial statement quality*. Universitas Padjajaran, Bandung
- Raditya Silky Siregar, *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765
- Ridwan dan Ratifah, Iffa, *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Trikonomika Volume 11, No 1, Edisi Juni 2012. ISSN 1411-514X
- Roviyantie, D. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi
- Sekaran, U. (2006). *Research Method for Business, Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

- Sihombing, B. (2011) *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Situmorang, J. (2006) *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah*. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Zeyn Elvira, *Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN:2008-0685 Vol.1 No.1 april 2011Pp 21-37
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2012. *Ikhtisar Pemeriksaan Hasil Semester I Tahun 2012*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2011. *Ikhtisar Pemeriksaan Hasil Semester II Tahun 2011*.
- Departemen Dalam Negeri. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) Tahun 2011
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2012
- PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang- Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Suhada Sinta, *Analisis atas pengawasan fungsional pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada inspektorat kota Bandung*
- Umar, H. (2008), *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*.,Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widodo Tri, *Kapasitas Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Kunci Pengembangan Kemampuan Pemerintah Daerah di Era Otonomi*
- Yadiati, W. (2010). *Teori Akuntansi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group